

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo belum berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa dibuktikan melalui beberapa aspek antara lain:

###### **1. Produktivitas**

Peningkatan produktivitas personil BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor belum bisa optimal karena tidak didukung oleh program atau kegiatan penanggulangan bencana yang baru dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Selama ini program unggulan yang selalu dilaksanakan adalah program desa tanggap bencana, yang sudah beberapa tahun ini berjalan dengan format yang sama, hanya berbeda tempat kegiatan saja, sehingga kurang efektif dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan personil. Minimnya program pelatihan dari BPBD Provinsi dan BNPB juga berpengaruh terhadap kurangnya perkembangan pengetahuan personil dalam menghadapi bencana.

## 2. Kualitas Layanan

Pada aspek kualitas layanan masih ditemukan kendala pada keterbatasan fasilitas – fasilitas fisik yang mampu mendukung kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor, yang mencakup alat – alat berat seperti *buldoser* dan *excavator*. Belum adanya peralatan berat tersebut selain disebabkan oleh keterbatasan anggaran, tetapi juga dari status BPBD yang masih tergolong di tipe B karena BPBD Kabupaten Wonosobo merupakan instansi yang terbilang masih cukup muda dibandingkan dengan instansi lainnya karena baru dibentuk pada tahun 2014, sehingga masih bertahap dalam pemenuhan kebutuhannya. Kemudian selama BPBD terbentuk juga belum pernah terjadi bencana tanah longsor yang berdampak sangat besar sehingga belum ada bantuan peralatan yang mumpuni dari BNPB.

## 3. Responsivitas

BPBD Kabupaten Wonosobo seringkali menerima keluhan mengenai lamanya waktu untuk sampai ke lokasi kejadian bencana tanah longsor. Artinya waktu respon untuk sampai ke lokasi kejadian bencana belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesiapan dari petugas PUSDALOPS BPBD untuk merespon dengan cepat, jarak ke lokasi kejadian bencana yang jauh, dan medan yang sulit untuk sampai ke lokasi kejadian bencana.

### **5.1.2 Faktor - Faktor yang menjadi Kendala Tidak Optimalnya Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala tidak optimalnya kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor, antara lain :

#### **1. Kurangnya peralatan penunjang kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor**

Ketersediaan peralatan yang tersedia di kantor BPBD Kabupaten Wonosobo terutama peralatan berat yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana tanah longsor masih belum dimiliki sama sekali. Hal ini bisa menghambat dan membuat lama waktu penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Proses penanganan bencana tanah longsor menjadi tidak optimal dan tidak efisien karena masih mengandalkan tenaga manusia secara manual untuk membersihkan longoran yang ada, terlebih jika bencana tanah longsor yang terjadi cukup besar.

#### **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Wonosobo yang masih belum mencukupi baik itu dari jumlah pegawai yang berstatus PNS maupun non PNS menjadi salah satu faktor yang menghambat pada saat terjadi bencana tanah longsor. Proses penanggulangan bencana tanah longsor yang memiliki banyak tahapan sehingga memerlukan banyak tenaga dalam setiap prosesnya. Melihat kondisi ketersediaan pegawai yang cukup minim mengakibatkan penanganan bencana

tanah longsor tidak dapat berjalan optimal sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

3. Kurang efektifnya tindakan pemulihan atau rehabilitasi wilayah terdampak bencana tanah longsor

BPBD Kabupaten Wonosobo masih terkendala lamanya waktu pemulihan wilayah terdampak bencana. Khususnya wilayah yang terkena bencana longsor besar yang membuat banyak fasilitas dan rumah warga rusak. Tindakan rehabilitasi yang berdasarkan kondisi tersebut biasanya memerlukan waktu yang lama karena kecepatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari ketersediaan lahan untuk merelokasi warga untuk membuat hunian baru, ketersediaan anggaran, dan koordinasi dengan banyak instansi terkait seperti Dinas Permukiman yang bertugas untuk membangun hunian baru.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo, maka saran yang dapat penulis sampaikan agar kinerja BPBD dapat lebih baik untuk kedepannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja BPBD dalam aspek produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas, maka perlu dilakukan :
  - a) Mengembangkan atau menyisipkan format dan materi baru terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor secara lebih spesifik. Misalnya dengan mempertajam serta mengembangkan program

desa tanggap bencana menjadi program keluarga tanggap bencana (KATANA) dengan hadirnya format dan materi baru diharapkan mampu meningkatkan keterampilan baru, dan rasa antusiasme para personil BPBD.

- b) Mengoptimalkan penggunaan peralatan – peralatan yang sudah dimiliki oleh BPBD Kabupaten Wonosobo yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko maupun dampak yang bisa ditimbulkan akibat adanya tanah longsor yaitu alat Landslide Early Warning System (LEWS). Melalui pemanfaatan alat yang sudah tersebar di 9 lokasi rawan bencana tanah longsor ini setidaknya dapat meningkatkan rasa kewaspadaan dan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor, sehingga mampu meminimalisir resiko terkena longsor.
- c) Menerapkan atau menetapkan standar waktu respon (respond time rate) untuk sampai ke lokasi bencana dalam kurun waktu tertentu agar ada standar pasti, seperti yang dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran dengan waktu sampai ke lokasi bencana selama maksimal 15 menit. Hal ini bisa juga dilakukan pada penanggulangan bencana tanah longsor, hanya tinggal disesuaikan dengan kondisi medan di daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk mengurangi kendala yang membuat tidak optimalnya kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor, maka perlu dilakukan :

- a) Memastikan peralatan yang sudah ada di desa seperti alat LEWS berjalan dengan baik melalui pemanfaatan Babinsa untuk memelihara dan merawat alat agar tetap bisa berfungsi normal, kemudian sekaligus juga bisa

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi dan tanda bahaya dari alat tersebut.

- b) Mengoptimalkan peran dari pemerintah desa dalam membina relawan atau mengedukasi masyarakat akan bahaya terjadinya bencana tanah longsor, karena desa juga sebenarnya mempunyai anggaran untuk penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk menyasati keterbatasan SDM dari BPBD yang tidak bisa turun dan menjangkau semua daerah di Kabupaten Wonosobo.
- c) Membuat kebijakan atau memperbaharui peraturan yang berkaitan dengan tindakan pascabencana terutama persoalan perumahan masyarakat yang terkena dampak bencana. Peraturan yang mengatur hal tersebut perlu untuk diperbaharui agar lebih jelas dan konkrit serta sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.